

**PERAN SEKRETARIAT DPRD
DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPRD
(STUDI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
ROTE NDAO)**

Jesica Magdalena Lay¹, Jacob Wadu², Belandina L. Long³, Nursalam⁴

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia^{1,2,3,4}*

Email: jesicalay03@gmail.com

ABSTRACT

Role is the behavior or behavior of a person or group in carrying out the duties of the position or position that is carried out. The role of the DPRD Secretariat is how to carry out its duties and functions in supporting the functions of the DPRD. This research aims to analyze the role of the DPRD Secretariat in supporting the functions of the Rote Ndao Regency DPRD. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The types and sources of data obtained are primary data and secondary data. The results showed that the role of the DPRD Secretariat was not maximized in supporting the function of the Rote Ndao Regency DPRD. The main obstacles faced are the limited number of employees, budget, infrastructure, and staff skills in supporting administrative digitization. This has an impact on the slow work process and less than optimal service to the DPRD. Therefore, an increase in resources is needed to realize a better role of the DPRD Secretariat.

Keywords: *Secretariat Role, Resources, Rote Ndao Regency Council*

ABSTRAK

Peran merupakan perilaku atau tingkah laku seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dari posisi atau jabatan yang dijalankan. Peran Sekretariat DPRD adalah bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung fungsi DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sekretariat DPRD kurang maksimal dalam mendukung fungsi DPRD Kabupaten Rote Ndao. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah pegawai, anggaran, infrastruktur, dan keterampilan staf dalam mendukung digitalisasi administrasi. Hal ini berdampak pada lambatnya proses kerja dan kurang optimalnya pelayanan kepada DPRD. Oleh karena itu dibutuhkan

peningkatan sumber daya guna mewujudkan peran Sekretariat DPRD yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: *Peran Sekretariat, Sumber Daya, DPRD Kabupaten Rote Ndao*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana telah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan pelaksanaannya berpegang pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) yang mengatur sistem pemerintah daerah selanjutnya, anggota DPRD diisi melalui pemilihan umum yang diadakan secara langsung. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sekretariat DPRD berperan sebagai pejabat administrasi dan menunjang tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dan secara administratif. Secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

Dilihat dari tugas dan fungsinya, dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai pengaruh dan peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Berdasarkan pernyataan tersebut, pada saat wawancara pra penelitian calon

peneliti menemukan bahwa pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao terdapat masalah yang sering terjadi seperti keterlambatan dalam mempersiapkan administrasi sidang, risalah sidang dan sidang yang tidak selesai tepat waktu. Administrasi sidang terdiri atas persiapan sidang (penjadwalan sidang, pengaturan tempat dan penyusunan agenda), pengelolaan dokumen (penyediaan materi sidang dan penyusunan risalah sidang), pelaksanaan sidang (koordinasi pelaksanaan, pencatatan kehadiran, dan pengaturan waktu), fasilitasi diskusi (pengaturan pembicara dan pengelelolaan interaksi), tindak lanjut (penyampaian keputusan dan implementasi rekomendasi), evaluasi sidang (penilaian proses dan pengumpulan umpan balik), dan pengelolaan keamanan dan ketertiban (pengaturan keamanan dan penegakan tata tertib). Sebagai indikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao belum berfungsi maksimal ditunjukkan dengan adanya keluhan pimpinan dan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD. Faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD. (LKIP Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao 2024).

Tabel 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	7	4	11
D3	1	-	1
S1	7	2	9
Total	15	6	21

Sumber: Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 lambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao saat ini sangat terbatas. Hal ini berdampak pada

Tabel 2 Jumlah pegawai dan jumlah pegawai yang dibutuhkan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

No	Bagian	Jumlah pegawai yang ada	Jumlah pegawai yang dibutuhkan	Jumlah Keseluruhan
1	Sekretaris DPRD	1 orang	-	1 orang
2	Umum	10 orang	4 orang	14 orang
3	Kelembagaan dan Persidangan	4 orang	4 orang	8 orang
4	Keuangan	6 orang	4 orang	11 orang
	Jumlah	21 orang	12 orang	34 orang

Sumber: Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao saat ini masih sangat kurang. Saat ini, Sekretariat DPRD memiliki 21 orang pegawai. Melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab), ditetapkan bahwa Sekretariat DPRD memerlukan tambahan pegawai sebanyak 12 orang, dibagian umum 4 orang, dibagian kelembagaan dan persidangan 4 orang dan dibagian keuangan 4 orang. Kurangnya jumlah pegawai sekretariat DPRD menjadi faktor penyebab lambatnya persiapan administrasi persidangan, dengan jumlah pegawai yang terbatas dan beban kerja yang tinggi maka efisiensi dalam persiapan administrasi sidang dapat menurun atau terlambat, sehingga berdampak pada pelaksanaan persidangan.

Tabel 3 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

Tahun	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
-------	-----------------	--------	-----------	-----------------------

2023	Penyusunan Perda	9 Perda	4 Perda	44,44%
	Keputusan	18 Keputusan	10 Keputusan	55,55%
	Penyusunan Ranperda	2 Ranperda	1 Ranperda	50%
2024	Penyusunan Perda	9 Perda	4 Perda	44,44%
	Keputusan	18 Keputusan	9 Keputusan	50%
	Penyusunan Ranperda	2 Ranperda	1 Ranperda	50%

Sumber: Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao 2023-2024

Berdasarkan data pada tabel 3 menunjukkan bahwa ada tahun 2023-2024, terdapat ketidakcukupan dalam mencapai target, khususnya pada penyusunan perda dan ranperda. Realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya masalah dalam kapasitas kerja pegawai sekretariat. Rata-rata persentase pencapaian target di bawah 50% menunjukkan ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan jumlah pegawai atau perbaikan metode kerja.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang di mana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga memberikan penjelasan serta pemahaman yang mendalam dan dapat memudahkan dalam memperoleh hasil yang objektif tentang Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Rote Ndao (Sugiyono, 2021). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rote

Ndao. Teknik penentuan sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD, Bagian Umum, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, Anggota DPRD kemudian data dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek administrasi yang berkaitan dengan kegiatan DPRD. Tugas ini mencakup pengelolaan surat-menyurat, pengelolaan dokumen dan arsip.

a) Pengelolaan Surat Menyurat

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan surat-menyurat di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sampai pada saat penelitian ini masih menggunakan sistem manual, baik penerimaan, pencatatan, distribusi, dan penyimpanan surat masuk dan keluar, dengan pencatatan dalam buku agenda dan penyimpanan

- dalam map terorganisir. Sistem a) Pengelolaan surat-menyurat di Kabupaten Rote Ndao masih manual karena kurangnya jumlah sumber daya manusia maupun kurangnya anggaran dan keterbatasan teknologi seperti perangkat lunak dan perangkat keras untuk sistem manajemen surat elektronik.
- b) Pengelolaan Dokumen dan Arsip Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen dan arsip masih menggunakan sistem manual. Pengelolaan dokumen dan arsip masih menggunakan sistem manual karena keterbatasan komputer dan keterbatasan akses jaringan serta keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran maupun infrastruktur dan keterampilan para staf.
- 2) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Setiap persidangan DPRD harus dibiayai, sehingga Sekretariat DPRD perlu menyiapkan anggaran yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, anggaran yang disiapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Anggaran ini mencakup semua biaya yang diperlukan mulai dari proses persidangan sampai dengan penetapan hasil sidang.
- a) Penyediaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Sidang Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao yang meliputi biaya operasional rapat, fasilitas, honorarium anggota, serta biaya administrasi dan dokumentasi cukup untuk memfasilitasi rapat DPRD mulai dari proses persidangan sampai dengan penetapan hasil sidang.
- b) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan DPRD Kabupaten Rote Ndao tepat waktu kecuali di bulan Januari. Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD pada bulan Januari biasanya disebabkan oleh prosedur administratif yang tidak terhindarkan seperti proses penganggaran dan penyusunan dokumen.
- c) Pengelolaan Dana Reses Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran dana reses dilakukan setelah anggota DPRD menyelesaikan kegiatan reses dan melaporkan hasil kegiatan mereka kepada pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD. Kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD adalah lambatnya pertanggungjawaban dana reses oleh anggota DPRD sehingga menghambat proses pengambilan keputusan terkait anggaran di masa mendatang.

- d) Pengawasan Anggaran Tahunan
Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan anggaran tahunan Sekretariat DPRD diawasi oleh anggota DPRD terutama melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait namun dalam pelaksanaannya mereka menghadapi berbagai hambatan yaitu penganggaran di DPRD mengalami inefisiensi sehingga menyulitkan mereka untuk melaksanakan kunjungan kerja lapangan, mereka juga mengatakan bahwa dinas teknis terkait tidak proaktif memberikan data kepada DPRD sehingga menyulitkan mereka untuk memantau secara detail pekerjaan-pekerjaan fisik.
- 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD
Administrasi dan materi persidangan yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD meliputi penyusunan dan distribusi agenda persidangan yang mencakup jadwal, topik, dan daftar hadir anggota Dewan, serta pencatatan dan penyusunan notulen yang berisi ringkasan pembahasan, keputusan, dan rekomendasi.
- a) Menyiapkan Administrasi Persidangan
Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi persidangan mencakup: 1) Penyiapan bahan persidangan, dukungan administrasi. Kendala yang dihadapi dalam penyiapan administrasi sidang adalah lambatnya penyiapan administrasi persidangan karena kurangnya jumlah pegawai.
- b) Fasilitasi Teknis Rapat
Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dukungan untuk fasilitasi teknis rapat untuk kelancaran sidang DPRD mencakup penyediaan administrasi yang lengkap, pengaturan fasilitas rapat yang memadai, serta koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Sekretariat DPRD berperan penting dalam menyiapkan ruang sidang, mengatur tempat duduk, dan menyediakan alat bantu seperti proyektor dan sistem suara, serta memastikan ketersediaan sarana penunjang lainnya, termasuk fasilitas kebersihan dan pendingin ruangan.
- c) Penyusunan Risalah Rapat
Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan risalah sidang sangat penting untuk jalannya persidangan. Meskipun risalah sidang seharusnya diselesaikan dalam waktu maksimal dua hari, kenyataannya seringkali terjadi keterlambatan dalam penyusunannya, karena kurangnya staf dan beban kerja yang tinggi. Hal ini berdampak pada proses legislasi dan pengambilan keputusan oleh DPRD.
- 4) Penyediaan dan Pengekoordinasian Tenaga Ahli
Proses perekrutan tenaga ahli dimulai dari rapat antara anggota DPRD dan Sekretaris DPRD untuk pengajuan

usulan tenaga ahli dari setiap fraksi. Pemanfaatan tenaga ahli merujuk pada penggunaan dan pengelolaan tenaga ahli yang telah direkrut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu dalam organisasi. Ini mencakup penempatan tenaga ahli pada posisi yang tepat sesuai dengan keahlian mereka, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal.

a) Rekrutmen Tenaga Ahli

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen tenaga ahli di DPRD dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak (anggota DPRD, Sekretaris DPRD dan Perguruan Tinggi). Proses ini terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga ahli yang sesuai di bidang ekonomi, politik, dan hukum

b) Pemanfaatan Tenaga Ahli

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tenaga ahli bersifat perorangan dan berdasarkan kepentingan tertentu seperti penyelesaian masalah, ingin mendapat masukan dan mengambil keputusan tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten

Rote Ndao)” maka dapat disimpulkan bahwa peran Sekretariat DPRD kurang maksimal dalam mendukung fungsi DPRD Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao No. 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Secara umum, Sekretariat DPRD sudah menjalankan tugas pokoknya, namun masih perlu peningkatan dalam aspek administrasi, teknologi, dan sumber daya untuk dapat lebih maksimal mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao maka saran yang diberikan penulis adalah Digitalisasi Administrasi, Peningkatan Sumber Daya, Penguatan Infrastruktur dan Evaluasi Inovasi Prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. 2021. CV. Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Rajawali, Jakarta.
- Luhung, Estiawan A., Sugiharto, Imawan., & Asmarudin, Imam. Peran Sekretariat DPRD dalam Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD. 2024. Penerbit NEM.
- Indartini, Mintarti., Wibisono, Nurharibnu., & Widjisenso,

- Assistriadi. Peran dan fungsi DPRD dalam perencanaan dan penganggaran daerah. 2019. Penerbit Taujih.
- Kusdi. Teori Organisasi dan Administrasi. 2011. Salemba Humanika, Jakarta.
- Hidayanti Rizka. 2020. "Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau." Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Riau.
- Pangkey, Yulita., Liando, Daud M., & Sampe, Stefanus. 2022. Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*. 1(2). 1-14.
- Ismail., Prasetdjowati, Tri., & Hidayati, Riska. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. 9(1). 1-11.
- Zahirudin, Lalu M., Alaydrus, Anwar., & Aisyah, Siti. 2024 Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 12(1). 1-9.
- Ramadhani, Rika. 2018. Peran Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*. 2(2). 1-18.
- Gulo, Foarota., Lase, Delipiter., Waruwu, Meiman H., & Zebua, Emanuel. Peranan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD: Studi Kasus di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias. 2022. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*. 1(1). 1-11.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao No. 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (2023). *Laporan Kinerja Instansi*

- Pemerintah Sekretariat DPRD* Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (2024).
Kabupaten Rote Ndao. Laporan Tahunan DPRD
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (2024). *Kabupaten Rote Ndao. Laporan Kinerja Instansi* Peraturan Bupati Rote Ndao No. 41 Tahun
Pemerintah Sekretariat DPRD 2016 Tentang Susunan Organisasi
Kabupaten Rote Ndao. dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (2023).
Laporan Tahunan DPRD
Kabupaten Rote Ndao.